

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan dasar untuk meringankan biaya atau pendanaan pendidikan non personalia kepada siswa tidak mampu dan meringankan siswa lainnya dan sebagai pelaksanaan program wajib belajar serta perluasan akses untuk upaya peningkatan mutu pendidikan karena hampir seluruh biaya kegiatan siswa dapat memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga digunakan untuk membiayai kebutuhan siswa kurang mampu atau miskin, agar mereka dalam keterbatasannya tetap dapat bersekolah. Dengan demikian tidak ada alasan lagi, bagi anak-anak usia sekolah wajib belajar, tidak dapat layanan pendidikan.

Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka program wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian standar nasional pendidikan pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM. Sasaran program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok sekolah nasional dan sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik).

Transparansi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat diperlukan dalam meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawah, bersih dalam arti tidak KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan berwibawa dalam arti profesional.

Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pendidikan Sekolah Dasar (SD), maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

4.2.1 Dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebaiknya lakukan dengan tepat proses pengelolaanya dan ikuti langkah-langkahnya dengan baik agar tidak terjainya kesalahan saat mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

4.2.2 Sebaiknya semua pihak stakeholder yang terkait dengan program kerja yang menggunakan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) supaya lebih aktif dan berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

4.2.3 Perlu adanya keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga menghindari tindakan pidana dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

Jurnal dan skripsi :

Anggaran, P., Dan, P., & Desa, B. *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)*. Jurnal Eksekutif, Vol 1 No 1 Tahun 2017.

Bobi Amalanda. 2018. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMA Negeri 5 Madiun Jawa Timur Tahun Ajaran 2017/2018*.

Dimas Suliyanto. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Negeri Senduro Kabupaten Lumajang*. Journal og Accounting.

Ella Febya Ardani, Syunu Trihantoyo. *Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Lingkungan SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya*. Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan Vol 08 No 03 Tahun 2020.

Hanni Andini. 2018. *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman)*.

Ida Bagus Made Sutra Isvara Pemas, dkk. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Negeri 2 Bangkala Yang Menerapkan Sistem Pendidikan Inklusi)*. Vol8 No 2 Tahun 2017.

Jumiati. *Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana BOS SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang*.

- Mifta Indah Wahinun, Supriadi, Nurdiana Fitri Isnaini. *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Mi Roudlotus Salam.*
- Mujiono. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).* Jurnal Ilmu Manajemen Vol 3 No 2 Tahun 2017.
- Putera, R. E. *Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Di Kabupaten Tanah Datar Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal.* Sosiohumaniora, Vol 18 No 3 Tahun 2016.
- Sa'diyah, Darmanto dkk. *Kontribusi Dana BOS Terhadap Siswa Miskin Di Lima Sekolah Swasta di Kecamatan Cakung Jakarta Timur.* Vol. 2 Tahun 2016.
- Sri Wayuni Oktavia Sari, dkk. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).*
- Sugiono Eksantoso. *Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).* Jurnal Ilmiah Adikara Cendekia Vol 1 No 1 Tahun 2020.
- Sulfiati, dkk. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Sinjai.* Jurnal Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 Nomor 2 Tahun 2010.
- Suwanda, W, & Pratiwi, D. *Laporan Keuangan Sebagai Bentuk Transparansi Pengelolaan Anggaran Ipdn Kampus Kalimantan Barat.* Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, Vol 3 No 1 Tahun 2018.
- Syamsir, Arifin Amhad, dkk. *Pelaksanaan Program Bantuan Operasi Sekolah (BOS) DI SMP Negeri 3 Panca Rijang Kbaupaten Sidrap.*
- Whayudi, Nanang. 2018. *Penerapan Prinsip Tranparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) Di SMK Negeri 2 Lumajang.*

Internet :

<https://www.pengadaan.web.id/2019/12/transparasi> diakses pada tanggal 19 Juni 2021, pukul 15.58

<https://www.mongabay.co.id/tata-kelola-prinsip-tata-kelola-yang-baik> diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 16.45

<https://eprints.uny.ac.id>. Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Pengetahuan Bendahara Dalam Mengelola Keuangan. Diakses tanggal 17 Juni 2021 pukul 00.05

Undang-undang :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009.

Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang program pengelolaan BOS.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 59.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2020.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 ayat 1 tahun 2008.